

Kepemimpinan Kepala Desa Dalam Persilangan Budaya Pariaman Dan Identitas Budaya Melayu Di Desa Rimbo Panjang

Reski Ananda Saputra ¹⁾, Fitrahadi khaz ²⁾

¹⁾ Universitas Riau, Pekanbaru, Indonesia, reskianandasaputra23021994@gmail.com

²⁾ STIA Lancang Kuning Dumai, Dumai, Indonesia, fitrahadikhaz@gmail.com

Abstrak

Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis kepemimpinan Kepala Desa Rimbo Panjang dalam penyelenggaraan pemerintahan desa di tengah masyarakat multikultural, menganalisis pengaruh budaya Pariaman terhadap pembentukan kepemimpinan kepala desa, serta menganalisis implikasi dominasi budaya Pariaman terhadap kualitas tata kelola pemerintahan desa. Penelitian menggunakan metode penelitian kualitatif dengan pendekatan studi kasus. Teknik pengumpulan data dilakukan melalui observasi, wawancara mendalam, dan dokumentasi dengan melibatkan kepala desa, perangkat desa, tokoh masyarakat, tokoh adat, tokoh agama, dan masyarakat Desa Rimbo Panjang. Analisis data dilakukan secara deskriptif kualitatif melalui tahapan reduksi data, penyajian data, dan penarikan kesimpulan. Hasil penelitian menunjukkan bahwa kepemimpinan Kepala Desa Rimbo Panjang telah menjalankan fungsi kepemimpinan sebagai penentu arah, wakil dan juru bicara organisasi, komunikator, mediator, dan integrator sebagaimana dikemukakan oleh Sondang P. Siagian, namun implementasinya belum sepenuhnya mencerminkan kepemimpinan yang inklusif dalam masyarakat multikultural. Budaya Pariaman memiliki pengaruh yang kuat terhadap pembentukan kepemimpinan kepala desa melalui modal sosial, jaringan kekerabatan, solidaritas kelompok, dan legitimasi politik yang berkembang secara berkelanjutan sejak berdirinya desa. Dominasi tersebut tidak hanya terlihat pada keberlanjutan kepemimpinan kepala desa dan struktur aparatur pemerintahan, tetapi juga pada berbagai aktivitas sosial, budaya, adat, dan keagamaan yang lebih banyak merepresentasikan tradisi Pariaman dibandingkan budaya Melayu maupun budaya etnis lainnya. Kondisi tersebut berimplikasi terhadap kualitas tata kelola pemerintahan desa, terutama pada aspek representasi politik, partisipasi masyarakat, keterbukaan, kesetaraan, dan penerapan prinsip-prinsip *good governance*. Penelitian ini memberikan kontribusi terhadap pengembangan kajian politik lokal mengenai hubungan budaya, kepemimpinan, modal sosial, dan kekuasaan dalam penyelenggaraan pemerintahan desa pada masyarakat multikultural.

Kata kunci: *kepemimpinan kepala desa, budaya Pariaman, budaya Melayu, politik lokal, tata kelola pemerintahan desa.*

Abstract

This study aims to analyze the leadership of the Village Head of Rimbo Panjang in administering village governance within a multicultural society, examine the influence of Pariaman culture on the formation of village leadership, and analyze the implications of Pariaman cultural dominance for the quality of village governance. The study employed a qualitative research method using a case study approach. Data were collected through observation, in-depth interviews, and documentation involving the village head, village officials, community leaders, traditional leaders, religious leaders, and local residents of Rimbo Panjang Village. Data were analyzed using descriptive qualitative techniques through data reduction, data presentation, and conclusion drawing. The findings reveal that the Village Head has performed the leadership functions of direction setter, organizational representative and spokesperson, communicator, mediator, and integrator as proposed by Sondang P. Siagian. However, their implementation has not fully reflected inclusive leadership within a multicultural society. Pariaman culture exerts a significant influence on the formation of village leadership through social capital, kinship networks, group solidarity, and political legitimacy that have been continuously maintained since the establishment of the village. This dominance is reflected not only in the continuity of village leadership and the composition of the village bureaucracy but also in various social, cultural, customary, and religious activities that predominantly represent Pariaman traditions rather than Malay culture or other ethnic traditions. These conditions have implications for the quality of village governance, particularly regarding political representation, community participation, transparency, equality, and the implementation of good governance principles. This study contributes to the development of local political studies by explaining the relationship between culture, leadership, social capital, and political power in village governance within a multicultural society.

Keywords: *village leadership, Pariaman culture, Malay culture, local politics, village governance.*

PENDAHULUAN

Desa merupakan unit pemerintahan yang berada pada tingkat paling bawah dalam sistem pemerintahan di Indonesia dan memiliki posisi strategis sebagai ujung tombak penyelenggaraan pemerintahan, pembangunan, pelayanan publik, serta pemberdayaan masyarakat. Kedudukan desa semakin memperoleh legitimasi yang kuat setelah diberlakukannya Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa yang memberikan kewenangan lebih luas kepada pemerintah desa dalam mengatur dan mengurus kepentingan masyarakat berdasarkan hak asal usul dan adat istiadat setempat. Dalam perspektif Ilmu Politik desa tidak hanya dipandang sebagai entitas administratif tetapi juga merupakan arena politik lokal tempat berlangsungnya proses distribusi kekuasaan, representasi politik, pembentukan kebijakan publik, kompetisi elite lokal, serta interaksi antara negara dan masyarakat. Talcott Parsons (1951) menjelaskan bahwa keberhasilan suatu sistem sosial sangat dipengaruhi oleh kemampuan pemimpin dalam mengintegrasikan berbagai unsur masyarakat sehingga tercipta keseimbangan sosial, stabilitas politik, dan keteraturan dalam kehidupan bersama. Robert D. Putnam (1993) menjelaskan bahwa kualitas pemerintahan tidak hanya ditentukan oleh struktur kelembagaan formal, tetapi juga dipengaruhi oleh tingkat kepercayaan masyarakat, partisipasi warga, kekuatan modal sosial, serta kemampuan lembaga pemerintahan dalam membangun pemerintahan yang inklusif. Pierre Bourdieu menegaskan bahwa kelompok yang memiliki modal sosial, modal budaya, dan modal simbolik yang kuat cenderung memiliki peluang lebih besar dalam mempertahankan dominasi pada ruang-ruang kekuasaan. Geert Hofstede (2001) menjelaskan bahwa budaya memiliki pengaruh yang sangat besar terhadap perilaku organisasi, pola komunikasi, proses pengambilan keputusan, gaya kepemimpinan, serta hubungan kekuasaan dalam suatu organisasi. Kepemimpinan kepala desa tidak hanya dipengaruhi oleh kapasitas administratif tetapi juga oleh nilai-nilai budaya yang melekat pada pemimpin maupun kelompok masyarakat yang menjadi basis sosial politiknya.

Provinsi Riau menganut identitas budaya Melayu secara historis menjadi fondasi utama kehidupan sosial, politik, dan pemerintahan. Nilai-nilai budaya Melayu seperti musyawarah, mufakat, kesantunan, keadilan, toleransi, penghormatan terhadap adat, serta semangat kebersamaan telah lama menjadi dasar dalam penyelenggaraan pemerintahan lokal. Desa Rimbo Panjang Kecamatan Tambang Kabupaten Kampar telah melahirkan dinamika sosial yang semakin kompleks akibat tingginya arus urbanisasi, migrasi penduduk, serta perkembangan kawasan permukiman. Kondisi tersebut menjadikan Desa Rimbo Panjang sebagai wilayah multikultural yang dihuni oleh berbagai kelompok etnis seperti 45% Minang Pariaman, 25% Minang Non Pariaman, 10% Jawa, 10% batak, 5% Melayu dan 5% beberapa etnis lainnya. Berikut tabel nama-nama Kepala Desa Rimbo Panjang dibawah ini :

Tabel 1.1 Nama-nama Kepala Desa Rimbo Panjang yang berasal dari Pariaman

No.	Kapala Desa	Tahun Jabatan
1.	Abdul Malik Yusuf	1974–1989
2.	Dasrul AR	1989–1999
3.	Masril	1999–2011
4.	Zalka Putra	2011–2017
5.	Heri	2017–2023
6.	Ben Zainal Arifin	2023–Sekarang

Sumber : Data Olahan Penulis Tahun 2026

Dilihat dari tabel diatas bahwa kelompok masyarakat Pariaman tidak hanya menjadi kelompok etnis dengan jumlah penduduk terbesar, tetapi juga memiliki posisi yang sangat dominan dalam struktur pemerintahan desa. Sejak Desa Rimbo Panjang berdiri hingga saat ini, kepemimpinan kepala desa secara berturut-turut dipegang oleh figur yang berasal dari kelompok masyarakat Pariaman. Kondisi tersebut diikuti dengan dominasi aparatur pemerintahan desa yang sebagian besar juga berasal dari kelompok budaya yang sama. Fenomena ini mengindikasikan bahwa kekuatan modal sosial, jaringan kekerabatan, solidaritas kelompok, serta hubungan patronase politik telah membentuk konfigurasi kekuasaan lokal yang relatif stabil dan berlangsung secara berkesinambungan. Dalam kondisi seperti ini, kompetisi politik tidak lagi hanya ditentukan oleh mekanisme demokrasi elektoral, tetapi juga dipengaruhi oleh kuatnya jaringan sosial dan budaya yang telah terbentuk sejak awal perkembangan desa.

Dominasi tersebut tidak hanya tampak pada struktur politik dan birokrasi pemerintahan desa tetapi juga diduga telah merambah berbagai aspek kehidupan sosial masyarakat. Berdasarkan observasi awal, berbagai aktivitas keagamaan, penyelenggaraan peringatan hari besar Islam, tradisi pesta perkawinan, pelaksanaan adat istiadat, hingga berbagai kegiatan sosial kemasyarakatan lebih banyak menggunakan tradisi dan budaya Pariaman dibandingkan budaya Melayu maupun budaya kelompok etnis lainnya. Bahkan dalam beberapa kegiatan keagamaan, pola penyampaian khutbah, ceramah, tata cara pelaksanaan kegiatan keagamaan, serta tradisi adat lebih banyak merepresentasikan kebiasaan masyarakat Pariaman yang secara perlahan menjadi budaya dominan dalam kehidupan masyarakat Desa Rimbo Panjang. Kondisi tersebut menunjukkan bahwa dominasi budaya tidak lagi hanya berada pada ranah sosial, tetapi diduga telah bertransformasi menjadi dominasi simbolik yang memengaruhi konstruksi identitas kolektif masyarakat dan memperkuat legitimasi kelompok tertentu dalam struktur kekuasaan desa.

Penelitian ini menawarkan nilai kebaruan yang membedakannya dari berbagai penelitian terdahulu. Kebaruan terletak pada analisis mengenai dominasi budaya Pariaman sebagai sumber kekuasaan politik lokal. Penelitian ini memandang budaya Pariaman bukan hanya sebagai identitas sosial kelompok pendatang, melainkan sebagai modal sosial, modal budaya, dan modal simbolik yang memiliki kemampuan membentuk struktur kekuasaan desa. Dominasi tersebut tidak hanya tercermin pada keberlanjutan kepemimpinan kepala desa dan dominasi aparatur pemerintahan tetapi juga terlihat pada berbagai praktik kehidupan masyarakat, seperti penyelenggaraan tradisi keagamaan, adat perkawinan, aktivitas sosial, hingga penggunaan nilai-nilai budaya Pariaman dalam berbagai kegiatan kemasyarakatan.

Berbagai penelitian terdahulu telah mengkaji kepemimpinan kepala desa dari berbagai perspektif. Widyia Ningsih Ayu (2019) menemukan bahwa kepemimpinan kepala desa berpengaruh terhadap efektivitas pelaksanaan tugas pemerintahan desa, namun penelitian tersebut lebih menitikberatkan pada aspek administrasi pemerintahan tanpa mengaitkannya dengan kondisi masyarakat multikultural. Dwinugraha (2020) menjelaskan bahwa kepemimpinan politik kepala desa dipengaruhi oleh legitimasi politik dan hubungan kekuasaan dalam pemerintahan desa, tetapi belum mengkaji bagaimana identitas budaya memengaruhi praktik kepemimpinan. Mulyeni dkk. (2023) menegaskan bahwa kepemimpinan kepala desa berperan penting dalam pembangunan sumber daya manusia melalui pemberdayaan masyarakat, namun penelitian tersebut belum membahas dinamika kepemimpinan dalam masyarakat yang memiliki keberagaman etnis. Putra Gama Dian De (2025) membahas pengaruh budaya lokal terhadap strategi kepemimpinan organisasi di Indonesia, tetapi objek

penelitian masih berada pada organisasi bisnis sehingga belum menjelaskan hubungan budaya lokal dengan tata kelola pemerintahan desa.

Adapun rumusan masalah dalam penelitian ini sebagai berikut :

1. Bagaimana kepemimpinan Kepala Desa Rimbo Panjang dalam penyelenggaraan pemerintahan desa di tengah masyarakat yang multikultural ?
2. Bagaimana budaya Pariaman memengaruhi pembentukan kepemimpinan kepala desa Rimbo Panjang?
3. Bagaimana implikasi dominasi budaya Pariaman terhadap kualitas tata kelola pemerintahan desa Rimbo Panjang?

Penelitian ini bertujuan untuk :

1. Menganalisis kepemimpinan Kepala Desa Rimbo Panjang dalam penyelenggaraan pemerintahan desa di tengah masyarakat yang multicultural
2. Menganalisis pengaruh budaya Pariaman terhadap pembentukan kepemimpinan Kepala Desa Rimbo Panjang dalam penyelenggaraan pemerintahan desa
3. Menganalisis implikasi dominasi budaya Pariaman terhadap kualitas tata kelola pemerintahan Desa Rimbo Panjang.

METODE PENELITIAN

Jenis penelitian yang penulis lakukan ini adalah jenis penelitian deskriptif kualitatif dengan metode studi kasus, yaitu penelitian yang berusaha mendeskripsikan kepemimpinan Kepala Desa dalam menjalankan tugas di Desa Rimbo Panjang Kecamatan Tambang Kabupaten Kampar. Jadi penelitian ini bertujuan untuk memperoleh informasi-informasi mengenai keadaan saat ini, dan melihat kaitan antara variabel-variabel yang ada. Penelitian dilakukan di Desa Rimbo Panjang, Kecamatan Tambang Kabupaten Kampar Provinsi Riau. Teknik pengumpulan yang digunakan oleh peneliti Penelitian Kepustakaan (Library Research), yaitu memanfaatkan perpustakaan sebagai saran dalam mengumpulkan data, dengan mempelajari buku-buku yang ada kaitannya dengan judul dan pembahasan skripsi ini sebagai referensi dan Penelitian Lapangan (Field Work Research), yaitu penelitian yang dilakukan secara langsung di lapangan dengan menggunakan beberapa teknik observasi, teknik wawancara langsung maupun tidak langsung, dan teknik dokumentasi Analisis data dilakukan dengan menggunakan analisis deskriptif kualitatif, yaitu dengan menginterpretasikan data yang diperoleh dari lapangan untuk memahami pola kepemimpinan kepala desa dalam konteks sosial budaya masyarakat.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Kepemimpinan Kepala Desa Rimbo Panjang Dalam Penyelenggaraan Pemerintahan Desa Di Tengah Masyarakat Yang Multikultural Menurut Sondang P. Siagian dalam buku *Teori dan Praktek Kepemimpinan*, fungsi kepemimpinan terdiri atas lima indikator, yaitu:

1. Sebagai Penentu Arah (Direction Setter)

Menurut Sondang P. Siagian, salah satu fungsi utama kepemimpinan adalah sebagai penentu arah. Seorang pemimpin memiliki tanggung jawab menentukan arah, tujuan, kebijakan, serta strategi organisasi agar seluruh aktivitas yang dilaksanakan dapat berjalan sesuai dengan visi dan misi yang telah ditetapkan.

Fenomena di Desa Rimbo Panjang menunjukkan adanya keberlanjutan kepemimpinan kepala desa yang berasal dari kelompok masyarakat Pariaman sejak awal berdirinya desa berpotensi membentuk arah penyelenggaraan pemerintahan yang dipengaruhi oleh nilai-nilai sosial dan

budaya kelompok tersebut. Hal ini terlihat dari dominasi kelompok Pariaman dalam struktur pemerintahan desa serta berkembangnya berbagai aktivitas sosial, budaya, dan keagamaan yang lebih banyak menggunakan tradisi Pariaman. Temuan ini terbukti melalui penelitian lapangan bahwa fungsi kepala desa sebagai penentu arah tidak hanya menentukan orientasi pembangunan desa, tetapi juga berkontribusi dalam membentuk arah perkembangan budaya organisasi pemerintahan dan kehidupan sosial masyarakat. Analisis terhadap fungsi penentu arah menjadi penting untuk mengetahui apakah kebijakan yang dihasilkan telah mencerminkan kepentingan seluruh masyarakat multikultural atau lebih mengarah pada penguatan identitas budaya kelompok dominan.

2. Sebagai Wakil dan Juru Bicara Organisasi

Menurut Sondang P. Siagian, pemimpin juga berfungsi sebagai wakil dan juru bicara organisasi. Dalam fungsi ini, pemimpin menjadi representasi organisasi dalam membangun hubungan dengan berbagai pihak, baik masyarakat, pemerintah yang lebih tinggi, lembaga kemasyarakatan, maupun organisasi lainnya.

Pada konteks Desa Rimbo Panjang bahwa fungsi representasi menjadi menarik untuk dianalisis karena masyarakat desa terdiri atas berbagai kelompok etnis dengan komposisi yang heterogen. Berdasarkan observasi awal kelompok masyarakat Pariaman merupakan kelompok yang paling dominan baik dari sisi demografi maupun struktur pemerintahan desa. Kondisi tersebut menimbulkan pertanyaan akademik mengenai sejauh mana kepala desa mampu menjalankan fungsi sebagai wakil seluruh masyarakat atau lebih banyak merepresentasikan kepentingan kelompok budaya yang menjadi basis sosial-politiknya. Pembuktian dilakukan melalui beberapa aspek, yaitu representasi dalam struktur pemerintahan desa, keterlibatan seluruh kelompok masyarakat dalam proses pengambilan keputusan, pemerataan pelayanan publik, keterwakilan berbagai kelompok etnis dalam kegiatan pemerintahan, serta kebijakan-kebijakan desa yang mencerminkan prinsip kesetaraan. Hasil penelitian menunjukkan bahwa representasi tersebut lebih banyak diberikan kepada kelompok budaya tertentu maka kondisi tersebut dapat mengindikasikan adanya dominasi representasi politik yang dipengaruhi oleh modal sosial, jaringan kekerabatan, dan politik identitas dalam penyelenggaraan pemerintahan Desa Rimbo Panjang.

3. Sebagai Komunikator

Fungsi berikutnya menurut Sondang P. Siagian adalah sebagai komunikator. Pemimpin harus mampu membangun komunikasi yang efektif agar informasi, kebijakan, serta tujuan organisasi dapat dipahami oleh seluruh anggota organisasi dan masyarakat.

Fenomena di Desa Rimbo Panjang menunjukkan bahwa berbagai kegiatan sosial dan keagamaan lebih banyak menggunakan tradisi yang berkembang dalam masyarakat Pariaman. Penelitian ini tidak hanya mengkaji efektivitas komunikasi pemerintah desa, tetapi juga bagaimana komunikasi tersebut menjadi media reproduksi kekuasaan politik lokal. Analisis difokuskan pada penggunaan simbol budaya, bahasa, tradisi keagamaan, keterlibatan tokoh masyarakat, serta pola interaksi pemerintah desa dalam berbagai kegiatan publik untuk mengetahui apakah komunikasi yang dibangun bersifat inklusif atau justru mereproduksi dominasi budaya kelompok tertentu. Dalam perspektif politik lokal komunikasi bukan sekadar proses penyampaian informasi, tetapi juga menjadi instrumen legitimasi kekuasaan, pembentukan identitas kolektif, serta penguatan pengaruh politik kelompok dominan terhadap masyarakat.

4. Sebagai Mediator

Menurut Sondang P. Siagian, salah satu fungsi penting seorang pemimpin adalah sebagai mediator, yaitu pemimpin yang mampu menyelesaikan konflik, menjembatani berbagai perbedaan kepentingan, serta membangun hubungan yang harmonis di dalam organisasi maupun masyarakat.

Dalam konteks Desa Rimbo Panjang fungsi kepala desa sebagai mediator menjadi penting untuk dianalisis karena masyarakat desa terdiri atas berbagai kelompok etnis dengan karakteristik sosial dan budaya yang berbeda. Berdasarkan hasil observasi awal, kelompok masyarakat Pariaman tidak hanya menjadi kelompok etnis terbesar, tetapi juga memiliki posisi yang dominan dalam struktur pemerintahan desa serta berbagai aktivitas sosial dan keagamaan masyarakat. Kondisi tersebut berpotensi menimbulkan persepsi mengenai ketimpangan representasi sosial dan politik, terutama apabila kelompok masyarakat lain merasa kurang memperoleh kesempatan untuk berpartisipasi dalam pemerintahan desa maupun dalam berbagai kegiatan kemasyarakatan.

Hasil observasi lapangan juga menunjukkan bahwa kepala desa lebih banyak menggunakan pendekatan komunikasi melalui jaringan sosial dan tokoh masyarakat yang berasal dari kelompok budaya Pariaman. Kondisi tersebut menyebabkan proses penyampaian aspirasi masyarakat cenderung didominasi oleh kelompok yang memiliki kedekatan sosial dan budaya dengan pemerintah desa akibatnya sebagian masyarakat dari kelompok etnis lain menilai bahwa kesempatan untuk berpartisipasi dalam proses pengambilan keputusan maupun memperoleh akses terhadap jabatan pemerintahan belum sepenuhnya berlangsung secara setara. Temuan ini menunjukkan bahwa fungsi kepala desa sebagai mediator belum sepenuhnya mampu menjembatani kepentingan seluruh kelompok masyarakat yang memiliki latar belakang budaya berbeda.

Temuan penelitian ini memperlihatkan bahwa fungsi mediator kepala desa di Desa Rimbo Panjang masih lebih berorientasi pada upaya menjaga stabilitas sosial daripada membangun keseimbangan representasi antarkelompok budaya. Stabilitas sosial memang tetap terjaga karena masyarakat masih menjunjung tinggi nilai-nilai kekeluargaan dan kehidupan bermasyarakat yang harmonis. Akan tetapi, di balik kondisi tersebut masih terdapat kecenderungan dominasi kelompok budaya tertentu dalam struktur kekuasaan, jaringan sosial, dan aktivitas kemasyarakatan yang berpotensi memengaruhi kualitas demokrasi lokal dan tata kelola pemerintahan desa.

5. Sebagai Integrator

Menurut Sondang P. Siagian, fungsi terakhir seorang pemimpin adalah sebagai integrator, yaitu kemampuan pemimpin dalam mempersatukan seluruh unsur organisasi dan masyarakat untuk mencapai tujuan bersama melalui kerja sama, koordinasi, dan sinergi.

Dominasi budaya Pariaman tidak hanya tampak dalam struktur pemerintahan desa, tetapi juga dalam berbagai kegiatan sosial, budaya, dan keagamaan. Akibatnya, ruang ekspresi budaya Melayu dan budaya etnis lain menjadi kurang terlihat. Integrasi sosial yang terbentuk lebih bersifat dominasi budaya daripada inklusif, sehingga partisipasi masyarakat, kesempatan dalam pemerintahan, serta kepercayaan terhadap prinsip keterbukaan, kesetaraan, dan keadilan dipengaruhi oleh kedekatan sosial, kekerabatan, dan jaringan budaya. Modal sosial kelompok

dominan berkembang menjadi modal politik yang memperkuat penguasaan terhadap pemerintahan desa.

Budaya Pariaman berpengaruh kuat terhadap pembentukan kepemimpinan Kepala Desa Rimbo Panjang. Pengaruh tersebut tercermin pada keberlanjutan kepala desa dan aparatur desa yang didominasi masyarakat Pariaman, serta arah kebijakan yang didukung oleh solidaritas, jaringan kekerabatan, dan modal sosial kelompok. Budaya Pariaman berkembang tidak hanya sebagai identitas sosial, tetapi juga sebagai modal politik yang memengaruhi pola kepemimpinan, pengambilan keputusan, rekrutmen aparatur, dan penyelenggaraan pemerintahan desa.

Dominasi budaya Pariaman berdampak pada kualitas tata kelola pemerintahan desa. Meskipun mampu memperkuat solidaritas dan stabilitas pemerintahan, dominasi tersebut menimbulkan persepsi kurang optimalnya representasi etnis lain dalam pemerintahan dan kegiatan publik. Oleh karena itu, kepala desa perlu memperkuat fungsi sebagai integrator dengan meningkatkan representasi seluruh kelompok etnis, memperluas partisipasi masyarakat, dan menyelenggarakan pemerintahan yang lebih inklusif, demokratis, representatif, dan berkeadilan.

KESIMPULAN

Berdasarkan hasil penelitian mengenai kepemimpinan Kepala Desa Rimbo Panjang dalam persilangan budaya Pariaman dan identitas budaya Melayu, dapat ditarik beberapa kesimpulan sebagai berikut.

1. Kepemimpinan Kepala Desa Rimbo Panjang telah menjalankan fungsi kepemimpinan, namun belum sepenuhnya inklusif karena masih didominasi budaya Pariaman sehingga representasi dan partisipasi seluruh kelompok budaya belum optimal.
2. Budaya Pariaman berpengaruh kuat terhadap pembentukan kepemimpinan desa melalui dominasi dalam struktur pemerintahan, jaringan sosial, dan budaya politik yang memperkuat keberlanjutan kekuasaan.
3. Dominasi budaya Pariaman mendukung stabilitas pemerintahan, tetapi berpotensi mengurangi representasi, partisipasi, dan penerapan prinsip *good governance*. Tata kelola desa perlu diarahkan pada kepemimpinan yang lebih inklusif.

Saran

1. Pemerintah Desa perlu menerapkan kepemimpinan yang lebih inklusif, transparan, dan berbasis kompetensi serta memberi ruang yang setara bagi seluruh kelompok budaya.
2. Pemerintah Kabupaten Kampar perlu memperkuat pembinaan dan pengawasan penerapan *good governance* serta pengembangan kapasitas kepala desa.
3. Masyarakat diharapkan menjaga persatuan, toleransi, dan memanfaatkan keberagaman sebagai modal sosial pembangunan.
4. Peneliti selanjutnya disarankan mengkaji hubungan budaya, politik identitas, dan kepemimpinan desa pada berbagai desa multikultural agar diperoleh pemahaman yang lebih komprehensif.

DAFTAR PUSTAKA

- Dwinugraha, A. P. (2020). Kepemimpinan Politik Kepala Desa. Publisia: *Jurnal Ilmu Administrasi Publik*, 5(2), 117–125
- Fairus, A. (2019). *Mengenal Desa dan Pemerintah Desa*. Jakarta: Pixelindo.
- Geert Hofstede. (2001). *Culture's Consequences: Comparing Values, Behaviors, Institutions and Organizations Across Nations*. Sage Publications.
- Guntara, A., Harpinsyah, Jamaludin, Nugraha, J., Setyoko, J., Miranti, & Jaya, M. (2020). *Politik dan Pemerintahan Desa: Membangun Model Inisiatif Lokal sebagai Identitas Etnis Melayu Jambi*. Jambi: Gre Publishing.
- Koentjaraningrat. 2009. *Pengantar Ilmu Antropologi*. Jakarta: Rineka Cipta.
- Krisjuyani, S. (2022). Kepemimpinan Kepala Desa dalam Pembangunan Desa. FOKUS: Publikasi Ilmiah untuk Mahasiswa, Staf Pengajar dan Alumni Universitas Kapuas Sintang, 20(2), 2599-3518
- Kusuma, L.S.T. (2018). *Politik Pemerintahan Desa di Indonesia: Konsep tentang Desa, Kepemimpinan, dan Manajemen Pemerintahan Desa*. Yogyakarta: Deepublish.
- Latif, A., Mustanir, A., & Irwan, A. (2019). *Kepemimpinan Pemerintahan Desa, Partisipasi Masyarakat dan Perencanaan Pembangunan*. Makassar: Qiara Media.
- Moleong, Lexy J. 2018. *Metodologi Penelitian Kualitatif*. Bandung: Remaja Rosdakarya.
- Mulyeni, S., Santi, S., Nurliah, L., Masitoh, I. S., & Paramarta, V. (2023). Peran Kepemimpinan Kepala Desa dalam Membangun Sumber Daya Manusia. *Jurnal Bintang Manajemen*, 1(4), 145–152.
- Northouse, Peter G. 2016. *Leadership: Theory and Practice*. Sage Publications.
- Nugroho, R., & Suprpto, F. A. (2021). *Kepemimpinan Pemerintah Desa Bagian 2: Kepemimpinan dan Demokrasi Desa*. Jakarta: Elex Media Komputindo.
- Putra Gama Dian De, 2025. "Pengaruh Budaya Lokal Terhadap Strategi Kepemimpinan Perusahaan Internasional Di Indonesia" *Journal of Economic, Business and Accounting* 8 No.6 : 2597-5234
- Qoiri, M. N., Iftitah, A., Suhariyanto, D., dkk. (2023). *Hukum Pemerintahan Desa*. Padang: Get Press Indonesia.
- Raharjo, M. M. (2020). *Kepemimpinan Kepala Desa*. Jakarta: Bumi Aksara.
- Raharjo, M. M. (2021). *Tata Kelola Pemerintahan Desa*. Jakarta: Bumi Aksara.
- Robert D. Putnam. (1993). *Making Democracy Work: Civic Traditions in Modern Italy*. Princeton University Press.
- Siagian, Sondang P. 2010. *Teori dan Praktik Kepemimpinan*. Jakarta: Rineka Cipta
- Syamsuadi, A., Hartati, S., Trisnawati, L., Elvitaria, L., Arisandi, D., & Syahrier, F. A. (2020). *Bijak Mengelola Desa: Sebuah Tinjauan Awal Penyelenggaraan Pemerintahan Desa*. Pekanbaru: Taman Karya.
- Talcott Parsons. (1951). *The Social System*. Free Press
- Tenas Effendy. (2004). *Tunjuk Ajar Melayu*. Pekanbaru: Lembaga Adat Melayu Riau.
- Widya Ningsih Ayu, 2019. "Kepemimpinan Kepala Desa Dalam Menjalankan Tugas Di Desa Jemparing Kecamatan Long Ikis Kabupaten Paser" *Jurnal Administrasi Negara* 7 No.2 : 9047-9059
- Yukl, Gary. 2013. *Leadership in Organizations*. Pearson Education.

Sumber Lain :

- https://id.wikipedia.org/wiki/Rimba_Panjang,_Tambang,_Kampar
- <https://www.radarnusantara.com/2018/01/tradisi-badikie-batalam-masyarakat.html>
- https://repository.uin-suska.ac.id/14782/9/9.%20BAB%20IV_201829KOM.pdf

<https://rimbopanjang.desa.id/artikel/2013/07/29/profil-masyarakat-desa>

Dokumen – Dokumen :

Undang-undang Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2008 Perubahan Kedua Atas Undang-undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah.

Undang-undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah.

Undang-undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa.

Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 84 Tahun 2015 tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja Pemerintah Desa.